

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, nagari juga merupakan kesatuan masyarakat adat yang memiliki sistem pemerintahan, nilai sosial, dan struktur kemasyarakatan yang khas. Wali Nagari, sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan nagari, memiliki tanggung jawab langsung dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Dalam konteks pembangunan daerah, Wali Nagari menjadi aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan yang dijalankan, sebab hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat diarahkan melalui kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari (PP No. 72 Tahun 2005).

Kedudukan penting tersebut tidak hanya bersifat sosial dan adat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa Wali Nagari memiliki kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mandat ini menunjukkan bahwa Wali Nagari bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi juga pemimpin pembangunan yang memegang peran strategis dalam menggerakkan potensi nagari secara optimal. Dengan kata lain, negara memberikan legitimasi formal kepada Wali Nagari untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan orientasi utama pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Hal ini menjadikan peran Wali Nagari tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan sosial,

karena menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (PP No. 72 Tahun 2005).

Tuntutan agar seorang pemimpin memperhatikan kebutuhan masyarakat juga sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam adalah mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan ulil amri. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ulil amri mencakup pemimpin pemerintahan dan para pemegang otoritas yang bertanggung jawab dalam menata kehidupan masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, serta memastikan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama. Ketaatan masyarakat kepada pemimpin akan terwujud apabila pemimpin mampu menjalankan tanggung jawabnya secara benar dan tidak menyalahi ketentuan syariat. Dengan demikian, ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa seorang pemimpin termasuk Wali Nagari memiliki kewajiban moral dan agama untuk menjaga keteraturan sosial, kesejahteraan rakyat, serta menegakkan prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan (Quraish Shihab, 2002, 92).

Meskipun secara konseptual nagari dirancang sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan mampu mengelola potensi lokalnya, kenyataan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum selalu berjalan sebagaimana diharapkan. Banyak nagari

menghadapi persoalan dalam pengelolaan sumber daya, kapasitas aparatur, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa peran pemimpin nagari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik pun sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya (Sutanto, 2020,112).

Salah satu sektor penting yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari adalah sektor ekonomi. Dalam banyak nagari di Sumatera Barat, keberadaan pasar nagari menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan produsen lokal, pedagang kecil, dan konsumen. Pasar nagari tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan. Secara teoretis, pasar yang dikelola dengan baik dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjadi fondasi kemandirian nagari. Namun keberhasilan ini sangat bergantung kepada bagaimana Wali Nagari menyusun strategi pembangunan, mengelola fasilitas pasar, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Haryanto, 2019, 54).

Pada konteks Nagari Sungai Batang di Kabupaten Agam, pembangunan pasar nagari juga dijadikan prioritas pemerintah nagari sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, berbagai persoalan masih ditemui dalam pelaksanaannya. Sejumlah catatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat mengenai arah pembangunan pasar, terutama pada tahap musyawarah dan perencanaan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa persoalan utama yang memicu perbedaan pendapat antara pemerintah nagari dan para pedagang berkaitan dengan prioritas pembangunan pasar nagari. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa warga,

salah satunya Bapak Candra mengatakan masyarakat dan aparaturnagari sering kali memiliki orientasi yang berbeda dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Pemerintah nagari lebih menekankan penyusunan program berdasarkan rencana jangka panjang, sementara masyarakat menginginkan solusi yang lebih langsung terhadap kebutuhan mereka di pasar (Candra, 2025). Hal serupa juga disampaikan Ibuk Marnibahwa beberapa pedagang merasa penataan kios belum dilakukan secara merata. Ada pedagang yang mendapatkan lokasi strategis, sedangkan sebagian lainnya ditempatkan pada lokasi yang kurang menguntungkan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan menciptakan persepsi adanya ketimpangan dalam kebijakan penataan. Selain itu, persoalan kebersihan pasar juga banyak dikeluhkan. Sampah yang menumpuk, saluran air yang tidak lancar, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan harian pasar membuat beberapa pedagang dan pengunjung merasa kurang nyaman. Masyarakat berharap pemerintah nagari dapat bergerak lebih cepat dalam merespons keluhan tersebut agar aktivitas jual beli berjalan lebih baik (Marni, 2025).

Selanjutnya permasalahan lain juga disampaikan oleh Bapak Rahman bahwa harga komoditas yang tidak stabil menjadi kendala yang sering mereka hadapi. Kondisi ini membuat penghasilan mereka tidak menentu. Selain itu, ketersediaan tempat berjualan bagi petani juga dirasakan masih terbatas, sehingga tidak semua petani dapat menjajakan hasil taninya dengan baik. Mereka berharap pemerintah nagari lebih memperhatikan kebutuhan ruang dan penataan khusus bagi pedagang hasil tani agar pasar benar-benar dapat menjadi sarana yang mendukung perekonomian masyarakat kecil (Rahman, 2025).

Dari rangkaian hasil wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek komunikasi dan penyelarasan aspirasi antara pemerintah nagari dan masyarakat. Pemerintah nagari menilai bahwa kebijakan yang diambil sudah melalui proses musyawarah, tetapi masyarakat merasa bahwa

beberapa kebutuhan mendesak di pasarseperti penataan kios, kebersihan, dan ketersediaan tempat bagi petanibelum mendapatkan perhatian yang memadai. Ketidaksinkronan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat mengenai arah pembangunan pasar nagari dan menjadi inti persoalan yang sering muncul di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembangunan pasar nagari telah dilaksanakan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hambatan-hambatan seperti perbedaan aspirasi, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya pengelolaan pasar memperlihatkan adanya jarak antara tujuan ideal penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di sinilah letak pentingnya kualitas kepemimpinan seorang Wali Nagari, terutama dalam hal kemampuan mengatur administrasi, menetapkan strategi pembangunan, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi di Nagari Sungai Batang, dapat dipahami bahwa peran Wali Nagari menjadi sangat penting dalam menjembatani harapan masyarakat dengan realitas pembangunan yang berlangsung. Keberhasilan pembangunan nagari bukan hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran dan program, tetapi juga oleh kemampuan Wali Nagari menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Peran Wali Nagari dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pasar Nagari Ditinjau dari Fikih *Siyasah Idariyah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini yakni bagaimana bentuk dan peran Wali Nagari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui

pengelolaan Pasar Nagari ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah* di Nagari Sungai Batang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Pasar Nagari di Desa Nagari Sungai Batang?
2. Bagaimana tinjauan fikih *siyasah idariyah* terhadap peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Nagari Sungai Batang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Pasar Nagari di Desa Nagari Sungai Batang.
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih *siyasah idariyah* terhadap peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Nagari Sungai Batang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam dan kajian *Siyasah Idariyah*, dengan menambah pemahaman mengenai peran pemerintahan nagari dalam mengelola perekonomian masyarakat sesuai prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik meneliti hubungan antara kepemimpinan pemerintahan desa dan pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Secara praktis, penelitian ini sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan program pemerintahan desa dan untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

1.6 Studi Literatur

Tinjauan kepustakaan merupakan sumber dasar dalam membuat suatu penulisan yang menjadi dasar untuk penelitian terhadap peninjauan karya ilmiah sejumlah teori serta pendapat ahli sebagai acuan penelitian penulisan yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis:

1. Skripsi yang disusun oleh Nadila Jupita Sari (12120420549) dari Jurusan Hukum Tata Negara *Siyasah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi berjudul “Analisa Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Mengenai Peran Wali Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Perspektif Fikih *Siyasah*”. Penelitian ini membahas pelaksanaan peran wali nagari sesuai amanat peraturan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan peran wali nagari sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam transparansi dan partisipasi Masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis Nadila Jupita Sari adalah sama-sama meneliti peran wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahan nagari menggunakan pendekatan Fikih *Siyasah*. Adapaun perbedaannya, fokus penelitian Nadila terletak pada penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 dalam konteks tata kelola pemerintahan nagari, sedangkan penelitian penulis menekankan peran wali nagari dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pasar nagari dengan pendekatan *Siyasah Idariyah*.
2. Skripsi yang disusun oleh Mesy Maidarnis (NPM 2030203050) dari Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, berjudul “Kewenangan Wali Nagari dalam Demokrasi Lokal (*Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara*).” Penelitian ini membahas kewenangan wali nagari dalam menjalankan fungsi pemerintahan pada tataran demokrasi lokal, terutama dalam proses

pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat di tingkat nagari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajiannya yang sama-sama membahas peran wali nagari sebagai aktor pemerintahan lokal dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*). Adapun perbedaannya, penelitian Mesy menitikberatkan pada aspek demokrasi lokal dan kewenangan politik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada fungsi ekonomi dan pengelolaan pasar nagari dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, yang menyoroti aspek administratif dan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

3. Skripsi yang disusun oleh Hesti Julianti Saputri (NPM 18220420642) dari Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Dusturiyah*), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, berjudul "*Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberhentian Perangkat Nagari oleh Wali Nagari di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.*" Penelitian ini mengkaji kewenangan wali nagari dalam memberhentikan perangkat nagari ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menjadikan wali nagari sebagai subjek utama dan menggunakan pendekatan *siyasah* dalam analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: Hesti meneliti aspek hukum administrasi pemerintahan dalam proses pemberhentian perangkat nagari, sedangkan penelitian penulis menyoroti peran wali nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar nagari berdasarkan pendekatan *Siyasah Idariyah*.
4. Skripsi yang disusun oleh Rezi Pradipta (NPM 18130420857) dari Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, berjudul "*Studi Kelayakan Pemekaran Nagari Lubuk Basung Perspektif Siyasah Syar'iyah.*" Penelitian ini membahas pertimbangan politik dan administratif dalam rencana pemekaran nagari, serta meninjau

kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Siyasah Syar'iyah*. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan *Siyasah Syar'iyah* dalam menganalisis kebijakan pemerintahan nagari serta peran pemimpin nagari terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Rezi lebih menyoroti kebijakan administratif dan pemekaran wilayah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi kebijakan ekonomi mikro melalui pengelolaan pasar nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Skripsi yang disusun oleh Ichsan Altsyadiqie (NPM 18120420733) dari Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari Perspektif Hukum Tata Negara Islam." Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi terkait tata cara pemilihan dan pemberhentian wali nagari dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan Hukum Tata Negara Islam dalam menganalisis kewenangan dan fungsi wali nagari. Adapun perbedaannya, penelitian Ichsan bersifat normatif, berfokus pada analisis regulasi administratif, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dengan fokus pada peran nyata wali nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar nagari.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai posisi seseorang dalam masyarakat. Peran berkaitan dengan norma dan nilai sosial yang mengarahkan perilaku individu. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa peran berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui proses sosialisasi dan pengendalian sosial.

Menurut Veithzal Rivai, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, sedangkan Miftah Thoha menyebut peran sebagai rangkaian perilaku yang muncul karena jabatan. Peran dibedakan menjadi peran yang diharapkan (*expected roles*) dan peran yang dijalankan secara nyata (*actual roles*).

Dalam teori peran, sebagaimana dikemukakan Robert Linton, peran adalah pola perilaku yang diharapkan sesuai ketentuan budaya. Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas menambahkan bahwa teori peran menekankan hubungan antara posisi sosial, interaksi, dan perilaku individu.

Dengan demikian, peran menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai statusnya serta bagaimana harapan sosial membentuk perilaku dalam masyarakat.

1.7.2 *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan salah satu cabang dari fikih *siyasah* yang membahas tata kelola administrasi pemerintahan dan pengelolaan urusan publik. Secara etimologis, *siyasah* berarti pengaturan atau pengelolaan urusan masyarakat, sedangkan *idariyah* berasal dari kata *al-idārah* yang bermakna administrasi atau pengurusan. Dengan demikian, *siyasah idariyah* dapat dipahami sebagai konsep pengelolaan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Suyuthi, 1997, 23).

Dalam pandangan para ulama, *siyasah idariyah* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada aspek kekuasaan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan hukum pemimpin terhadap masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk mengatur urusan masyarakat, menjaga ketertiban, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan publik melalui kebijakan yang adil dan teratur. Administrasi pemerintahan yang baik merupakan sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial (Al-Mawardi, 1996, 29).

Siyasah idariyah juga menempatkan pemimpin sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Setiap kebijakan administrasi yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak menimbulkan ketimpangan. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola administrasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat (Sjadzali, 1993, 71).

1.7.3 Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal yang hidup dan berkembang di Provinsi Sumatera Barat sebagai perwujudan dari prinsip otonomi daerah dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari memiliki kedudukan sebagai satuan pemerintahan terendah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pemerintahan nagari ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang menempatkan nagari sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007).

Dalam struktur pemerintahan nagari, Wali Nagari merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mengelola administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Nagari bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nagari, mengoordinasikan perangkat nagari, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara normatif, kedudukan dan kewenangan Wali Nagari mencerminkan fungsi eksekutif di tingkat nagari yang menuntut kemampuan

kepemimpinan, administrasi, dan komunikasi sosial yang baik (Ni'matul, 2015, 212).

Peran Wali Nagari tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan administratif, tetapi juga mencakup upaya mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nagari, pasar nagari merupakan salah satu instrumen penting yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Wali Nagari memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pasar nagari dilakukan secara tertib, adil, dan berorientasi pada kemanfaatan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan lokal yang menempatkan kepala desa atau kepala nagari sebagai penggerak pembangunan ekonomi berbasis kebutuhan masyarakat (Eko, 2014, 67).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contohnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell 2009,4)

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pasar nagari di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pasar nagari, khususnya terkait perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dan pedagang, serta bagaimana kebijakan dan tindakan Wali Nagari dijalankan dalam praktik pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menggali data

langsung dari sumber di lapangan. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara alami melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. (Moleong, 2017, 6).

Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan fokus penelitian pada pasar nagari sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Lokasi ini dipilih karena pasar nagari memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti penataan kios, fasilitas pasar, serta perbedaan pendapat antara pemerintah nagari dan pedagang. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menggali lebih jauh bagaimana peran Wali Nagari dalam mengelola pasar nagari dan sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui interaksi dan pengamatan peneliti di lapangan. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai secara langsung oleh peneliti (Moleong, 2017, 157).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam. Informan penelitian meliputi Wali Nagari Sungai Batang, aparatur pemerintahan nagari, pedagang pasar nagari, petani yang menjual hasil panen di pasar, serta masyarakat yang memanfaatkan pasar nagari. Data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai kondisi pasar nagari, bentuk perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dan masyarakat, serta

peran Wali Nagari dalam pengelolaan pasar nagari sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan diperoleh tidak secara langsung dari lapangan. Menurut Zainuddin Ali, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2014, 23).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, buku-buku yang membahas fikih *siyasah idariyah*, pemerintahan daerah, dan administrasi pemerintahan desa, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan peran pemerintah nagari dan pembangunan ekonomi masyarakat, serta data dari Wali nagari dan Ketua Pasar Raba'a. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen resmi nagari seperti laporan pembangunan nagari, data pasar nagari, dan arsip administrasi lainnya sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. (Bungin 2005, 136). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Wali Nagari Sungai Batang, aparatur pemerintahan nagari, pedagang pasar nagari, petani, serta masyarakat sekitar guna memperoleh data mengenai

kondisi pasar nagari, perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan, arsip, dokumen resmi, foto, maupun data tertulis lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019, 240). Dalam penelitian inidokumentasi meliputi pengumpulan dokumen resmi nagari seperti laporan pembangunan nagari, data pengelolaan pasar nagari, foto kondisi pasar, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan nagari.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai phenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian kualitatif (Suyanto 2005, 171).

Adapun teknik yang diterapkan dalam penentuan informan ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat mencakup individu yang dianggap paling memahami topik yang diteliti, atau mereka yang memiliki pengaruh, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono 2015, 53). Dalam penelitian ini, informan terdiri dari Wali Nagari Sungai Batang, Sekretaris Nagari Sungai Batang, dan masyarakat sekitar Nagari Sungai Batang. Kriteria ini dipilih karena ketiga pihak tersebut memiliki peran penting dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta kebijakan pemerintahan nagari. Wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program ekonomi masyarakat, sekretaris nagari berperan dalam administrasi dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, menyusun, dan mengelola data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi agar mudah dipahami serta dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih data yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna (Sugiyono, 2010, 244). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan peran Wali Nagari dalam pengelolaan pasar nagari serta perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan sesuai dengan model analisis data kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016, 137).

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi secara terorganisir sehingga memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu dalam data (Miles & Huberman, 1994, 10). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang menggambarkan kondisi pasar nagari, dinamika hubungan antara pemerintah nagari dan masyarakat, serta implementasi kebijakan Wali Nagari dalam praktik pemerintahan nagari.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis serta melakukan pengecekan kembali terhadap temuan penelitian agar kesimpulan yang

dihasilkan memiliki keabsahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan melihat pola-pola yang muncul dari data lapangan, kemudian dikaitkan dengan konsep dan prinsip fikih *siyasah idariyah*. Melalui tahap ini, peneliti menilai sejauh mana peran Wali Nagari dalam pengelolaan pasar nagari telah mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam *siyasah idariyah*, serta bagaimana praktik tersebut berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Sungai Batang.

